

**PENGEMBANGAN MODEL INTEGRATIF KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

Muhamad Faizin¹, Rumiya², Ahmad Fikri³, Dede Rosyada⁴

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

muhamad@fai.unsika.ac.id¹, rumiarum249@gmail.com²,
ahmad.fikri36@gmail.com³, dede.rosyada57@gmail.com⁴

ABSTRACT

Sustainable education has become one of the strategic agendas in global development, positioning education as a primary instrument for building an inclusive, equitable, and future-oriented society, as emphasized in the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 4 on quality education. In the Indonesian context, Islamic education holds a strategic position as it not only contributes to the development of students' intellectual capacities but also plays a significant role in character formation, moral values, and social sustainability. However, the implementation of sustainable education policies within the Islamic education sector continues to face various structural and conceptual challenges, including the dualism of the education system, policy fragmentation among institutions, disparities in educational quality and access, and the limited synergy among stakeholders in educational governance. These conditions indicate a gap between the paradigm of sustainable education, which requires a holistic approach, and the practice of Islamic education policy, which remains relatively partial and sectoral. This article aims to analyze the construction of Islamic education policy from the perspective of sustainable education and to formulate an integrative policy model that aligns with the characteristics and needs of Islamic education in Indonesia. This study employs a library research method using a conceptual approach and critical analysis of various academic literature, policy documents, educational regulations, and research findings related to sustainable education, Islamic education policy, systemic approaches, and the concept of multilevel governance. The analysis is conducted to identify the limitations of existing policy paradigms while exploring strategic principles for developing sustainable Islamic education governance. The findings reveal that Islamic education policies in Indonesia have not yet fully reflected the principles of sustainability, as they remain largely focused on institutional quality improvement, administrative management, and compliance with educational standards. Meanwhile, the aspects of value integration, system sustainability, and cross-stakeholder collaboration have not become the fundamental basis of policy development. Based on these findings, this article proposes an Integrative Model of Sustainable Education Policy built upon three main dimensions: (1) value integration, which connects Islamic educational principles with global sustainability values; (2) system integration, which harmonizes

various educational subsystems through a holistic approach; and (3) policy integration, which strengthens coordination and collaboration among different levels of government and educational actors. This model is characterized as adaptive, value-based, collaborative, and long-term oriented, making it a conceptual framework for transforming Islamic education policies into a more responsive system that addresses social change, global challenges, and the needs of future generations.

Keywords: *Sustainable Education, Islamic Education, Education Policy, Multilevel Governance, Systemic Approach, Integrative Policy Model*

ABSTRAK

Pendidikan berkelanjutan menjadi salah satu agenda strategis dalam pembangunan global yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi masa depan sebagaimana ditegaskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas. Dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam memiliki posisi strategis karena tidak hanya berperan dalam pengembangan kapasitas intelektual peserta didik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, nilai moral, dan keberlanjutan sosial. Namun, implementasi kebijakan pendidikan berkelanjutan pada sektor pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan konseptual, antara lain dualisme sistem pendidikan, fragmentasi kebijakan antara lembaga, ketimpangan kualitas dan akses pendidikan, serta belum optimalnya sinergi antaraktor dalam tata kelola pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara paradigma pendidikan berkelanjutan yang menuntut pendekatan holistik dengan praktik kebijakan pendidikan Islam yang masih cenderung parsial dan sektoral. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan berkelanjutan serta merumuskan model integratif kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan konseptual dan analisis kritis terhadap berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, regulasi pendidikan, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan, kebijakan pendidikan Islam, pendekatan sistemik, dan konsep multilevel governance. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan paradigma kebijakan yang berkembang sekaligus menemukan prinsip-prinsip strategis dalam membangun tata kelola pendidikan Islam yang berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberlanjutan karena masih terbatas pada orientasi peningkatan mutu institusi, administrasi kelembagaan, dan pemenuhan standar pendidikan, sementara aspek integrasi nilai, keberlanjutan sistem, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan belum menjadi fondasi utama kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menawarkan

Model Integratif Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan yang dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu (1) integrasi nilai yang menghubungkan prinsip pendidikan Islam dengan nilai keberlanjutan global, (2) integrasi sistem yang mengharmoniskan berbagai subsistem pendidikan melalui pendekatan holistik, dan (3) integrasi kebijakan yang memperkuat koordinasi serta kolaborasi antarlevel pemerintahan dan aktor pendidikan. Model ini memiliki karakteristik adaptif, berbasis nilai, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang sehingga mampu menjadi kerangka konseptual dalam transformasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, perkembangan global, dan kebutuhan generasi masa depan.

Kata kunci: Pendidikan Berkelanjutan, Pendidikan Islam, Kebijakan Pendidikan, Multilevel Governance, Pendekatan Sistemik, Model Integratif Kebijakan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena memiliki peran fundamental dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga karakter, kesadaran sosial, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Dalam perspektif pembangunan global, pendidikan ditempatkan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat mengenai *quality education*. Konsep pendidikan berkelanjutan menekankan bahwa sistem pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan akses dan capaian akademik, tetapi juga harus mampu membangun ekosistem pembelajaran yang inklusif, adil, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan generasi masa depan (UNESCO, 2020). Dalam konteks Indonesia, urgensi pendidikan

berkelanjutan semakin meningkat seiring munculnya berbagai tantangan, seperti percepatan transformasi digital, perubahan karakteristik pekerjaan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, serta tuntutan peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam kompetisi global.

Dalam konteks pendidikan Islam, keberlanjutan pendidikan memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan sistem dan institusi pendidikan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan nilai, moralitas, dan peradaban manusia. Pendidikan Islam sejak awal memiliki orientasi pembentukan manusia secara utuh (*insan kamil*) melalui keseimbangan antara aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial (Al-Attas, 2018). Nilai-nilai dasar pendidikan Islam seperti tauhid, keadilan, keseimbangan (*wasathiyah*), tanggung jawab (*amanah*), dan kemaslahatan memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip pendidikan berkelanjutan yang menekankan

keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki modal filosofis dan epistemologis yang kuat untuk berkontribusi dalam membangun paradigma pendidikan berkelanjutan yang tidak hanya menghasilkan individu yang kompeten, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sosial.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi dalam praktik kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Berbagai studi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam masih menghadapi persoalan struktural yang kompleks, seperti dualisme sistem pendidikan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, disparitas kualitas antar lembaga pendidikan Islam, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya integrasi kebijakan antarlevel pemerintahan dan pemangku kepentingan (Azra, 2019). Selain itu, berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan masih cenderung bersifat administratif dan sektoral, lebih berfokus pada pemenuhan standar kelembagaan daripada membangun sistem pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan. Akibatnya, terdapat jarak antara idealitas pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan manusia secara holistik dengan realitas kebijakan yang masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya berbasis keberlanjutan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pendidikan Islam bukan hanya terletak pada peningkatan kualitas institusi, tetapi juga pada bagaimana membangun paradigma kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai dimensi pendidikan secara menyeluruh. Pendekatan kebijakan pendidikan yang selama ini dominan cenderung melihat pendidikan sebagai sektor yang terpisah-pisah, sementara prinsip keberlanjutan membutuhkan pendekatan sistemik yang melihat pendidikan sebagai ekosistem yang melibatkan berbagai aktor, tingkatan pemerintahan, komunitas, dan lingkungan sosial. Dalam kerangka ini, konsep *multilevel governance* menjadi relevan karena menekankan pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan pembagian peran antaraktor dalam menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Akan tetapi, penerapan pendekatan tersebut dalam konteks pendidikan Islam Indonesia masih belum banyak dikaji secara mendalam.

Kajian mengenai pendidikan berkelanjutan, kebijakan pendidikan Islam, pendekatan sistemik, maupun *multilevel governance* telah berkembang dalam berbagai literatur. Namun, penelitian-penelitian tersebut sebagian besar masih bergerak dalam ruang kajian yang terpisah. Kajian pendidikan berkelanjutan lebih banyak menekankan aspek global dan lingkungan, sementara kajian pendidikan Islam lebih sering berfokus pada aspek nilai, kurikulum,

manajemen lembaga, atau penguatan karakter. Di sisi lain, kajian kebijakan pendidikan cenderung menyoroti aspek tata kelola dan implementasi kebijakan tanpa mengintegrasikan dimensi nilai Islam sebagai fondasi filosofis. Keterpisahan perspektif tersebut menunjukkan adanya research gap berupa belum tersedianya kerangka konseptual yang mampu menghubungkan nilai-nilai pendidikan Islam, prinsip keberlanjutan, pendekatan sistemik, dan tata kelola multilevel dalam satu model kebijakan yang integratif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual melalui pengembangan Model Integratif Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan dalam perspektif pendidikan Islam. Model ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan paradigma kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan mutu institusi, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai, sistem, dan tata kelola secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan berkelanjutan serta merumuskan model integratif yang adaptif, kolaboratif, dan relevan dengan konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam sekaligus menjadi alternatif kerangka berpikir bagi penguatan tata kelola pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap

tantangan global dan kebutuhan generasi masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji dan mengembangkan model kebijakan pendidikan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan Islam. Kajian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai data utama untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan konsep atau teori tertentu (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis kritis terhadap teori, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan, pendidikan Islam, pendekatan sistemik, dan multilevel governance. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya menghasilkan sintesis konseptual yang dapat menjelaskan keterkaitan antar konsep sekaligus menawarkan model kebijakan yang relevan dengan tantangan pendidikan Islam kontemporer.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal

dari publikasi lima tahun terakhir guna menjamin relevansi dan aktualitas kajian, khususnya yang membahas Sustainable Development Goals (SDGs), sustainable education, pendidikan Islam, tata kelola pendidikan, serta transformasi digital dalam pendidikan (UNESCO, 2020; OECD, 2023). Selain literatur mutakhir, beberapa karya klasik yang memiliki kontribusi penting terhadap pengembangan teori pendidikan dan kebijakan publik juga digunakan sebagai landasan konseptual untuk memperkuat argumentasi penelitian (Meadows, 2018; Peters & Pierre, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan secara sistematis. Tahap pertama dilakukan identifikasi dan seleksi literatur berdasarkan kesesuaian topik, kualitas sumber, serta kontribusinya terhadap fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah klasifikasi data ke dalam beberapa tema utama, yaitu pendidikan berkelanjutan, nilai-nilai pendidikan Islam, problematika kebijakan pendidikan Islam, pendekatan sistemik, dan multilevel governance. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep dan hasil penelitian terdahulu sehingga memungkinkan dilakukannya sintesis yang lebih mendalam (Snyder, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dan conceptual synthesis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi

konsep-konsep utama, pola hubungan antarvariabel, serta kecenderungan hasil penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan berkelanjutan dan pendidikan Islam (Krippendorff, 2019). Selanjutnya, sintesis konseptual dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis dan temuan penelitian ke dalam suatu kerangka berpikir yang utuh. Melalui proses tersebut dihasilkan model Integrative Sustainable Islamic Education Policy Model (ISIEPM) yang mengintegrasikan dimensi nilai (*value integration*), integrasi sistem (*system integration*), dan integrasi kebijakan (*policy integration*) sebagai kerangka konseptual pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang berkelanjutan. Model yang dihasilkan kemudian dianalisis secara kritis untuk menjelaskan kontribusi teoretis dan implikasi praktisnya terhadap pengembangan administrasi dan manajemen pendidikan Islam di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pendidikan Berkelanjutan sebagai Paradigma Baru Kebijakan Pendidikan

Perkembangan global pada abad ke-21 telah mendorong lahirnya paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan yang dikenal sebagai pendidikan berkelanjutan (*sustainable education*). Paradigma ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran dunia terhadap pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan

lingkungan (UNESCO, 2020; Tilaar & Nugroho, 2022). Dalam konteks pendidikan, keberlanjutan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menyediakan layanan pendidikan secara terus-menerus, tetapi juga sebagai kemampuan sistem pendidikan dalam menghasilkan generasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat pada masa mendatang (Nata, 2022).

Melalui agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat mengenai pendidikan berkualitas, dunia internasional menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2023). Pendidikan dipandang memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi abad ke-21, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (OECD, 2023; Syafaruddin, 2021). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak lagi berorientasi pada pencapaian target jangka pendek, melainkan harus mampu menjamin keberlangsungan mutu, pemerataan akses, relevansi kurikulum, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Fattah, 2020).

Dalam perspektif administrasi pendidikan, konsep pendidikan berkelanjutan menuntut adanya perubahan paradigma pengelolaan pendidikan dari pendekatan birokratis

menuju pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis sistem (Engkoswara & Komariah, 2020). Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai sekumpulan aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu ekosistem yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan kebijakan yang saling berinteraksi. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, efektivitas kebijakan, serta kemampuan lembaga pendidikan dalam merespons perubahan lingkungan eksternal (Mulyasa, 2022).

Di Indonesia, implementasi pendidikan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya integrasi kebijakan pendidikan menjadi faktor yang menghambat terwujudnya sistem pendidikan yang berkelanjutan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai dimensi yang memengaruhi keberhasilan pendidikan secara berkelanjutan.

Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Islam terhadap Pendidikan Berkelanjutan

Konsep pendidikan berkelanjutan sesungguhnya memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-

prinsip dasar pendidikan Islam. Islam memandang pendidikan sebagai proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang mencakup dimensi intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan moral (Al-Attas, 2018). Tujuan utama pendidikan Islam bukan hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi (Nata, 2020).

Konsep tauhid menjadi fondasi utama dalam pendidikan Islam. Tauhid tidak hanya dipahami sebagai keyakinan teologis, tetapi juga sebagai paradigma yang mengintegrasikan seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pendidikan (Al-Attas, 2018). Dalam konteks kebijakan pendidikan, nilai tauhid mendorong lahirnya kebijakan yang tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian indikator kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek moral, etika, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang berlandaskan tauhid memiliki orientasi jangka panjang yang selaras dengan prinsip keberlanjutan (Azra, 2019).

Selain tauhid, konsep keadilan (*al-'adl*) memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip *equity* dalam pendidikan berkelanjutan. Pendidikan Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam distribusi kesempatan belajar, akses terhadap sumber daya pendidikan, dan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik (Nata, 2020). Prinsip ini sejalan dengan tujuan pendidikan

berkelanjutan yang menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun geografis (UNESCO, 2020).

Nilai tawazun atau keseimbangan juga menjadi karakteristik penting dalam pendidikan Islam. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter, serta antara kepentingan individu dan kepentingan sosial (Azra, 2019). Perspektif tersebut sangat relevan dengan konsep *sustainability* yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan (Sterling, 2016).

Di samping itu, konsep amanah dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dalam administrasi pendidikan modern. Pengelolaan pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Nata, 2020). Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan Islam dapat menjadi landasan normatif yang memperkuat implementasi pendidikan berkelanjutan di Indonesia.

Tabel 1. Kesesuaian Prinsip Pendidikan Berkelanjutan dan Nilai Pendidikan Islam

Prinsip Pendidikan Berkelanjutan	Nilai Pendidikan Islam
<i>Equity</i>	<i>Al-'Adl (Keadilan)</i>
<i>Sustainability</i>	<i>Istimrariyah</i>

<i>Responsibility</i>	<i>Amanah</i>
<i>Inclusiveness</i>	<i>Rahmatan lil 'Alamin</i>
<i>Lifelong Learning</i>	<i>Thalabul 'Ilmi</i>

Problematika Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Meskipun pendidikan Islam telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, berbagai permasalahan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan. Salah satu persoalan utama adalah masih adanya dualisme sistem pendidikan yang memisahkan pendidikan umum dan pendidikan agama (Azra, 2019). Dualisme tersebut tidak hanya berdampak pada struktur kelembagaan, tetapi juga memengaruhi perumusan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan kurikulum. Pada level implementasi, dualisme pendidikan sering kali menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan kebijakan antara berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Akibatnya, pengembangan mutu pendidikan Islam berjalan lebih lambat dibandingkan tuntutan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompleks (Kementerian Agama RI, 2023).

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan Islam. Sebagian madrasah dan pesantren telah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang modern dan kompetitif, namun masih banyak

lembaga pendidikan Islam yang menghadapi keterbatasan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta akses terhadap teknologi informasi (Kementerian Agama RI, 2023). Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya mampu mewujudkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tantangan berikutnya adalah transformasi digital yang berlangsung sangat cepat.

Digitalisasi pendidikan telah mengubah pola pembelajaran, sistem administrasi, serta model interaksi antara guru dan peserta didik (Selwyn, 2021). Namun demikian, kesiapan lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi transformasi tersebut masih relatif beragam sehingga memerlukan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi (OECD, 2023). Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Islam memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Kebijakan yang bersifat parsial dan sektoral tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan pendidikan pada era digital dan globalisasi (World Bank, 2021).

Pendekatan Sistemik dan Multilevel Governance dalam Reformasi Pendidikan Islam

Pendekatan sistemik menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami dan

mengelola pendidikan. Dalam pendekatan ini, pendidikan dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain (Meadows, 2018). Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas salah satu komponen, tetapi oleh efektivitas interaksi seluruh komponen dalam sistem tersebut. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan sistemik memungkinkan integrasi antara kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, tata kelola lembaga, dan lingkungan sosial. Kelemahan pada salah satu komponen dapat memengaruhi kinerja keseluruhan sistem pendidikan. Oleh karena itu, reformasi pendidikan Islam harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada perbaikan aspek tertentu saja (Fullan, 2020).

Selain pendekatan sistemik, konsep *multilevel governance* menjadi semakin relevan dalam tata kelola pendidikan modern. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas lokal (Peters & Pierre, 2016). Dalam pendidikan Islam, implementasi *multilevel governance* memiliki potensi besar karena karakteristik pendidikan Islam yang berbasis masyarakat. Keberadaan pesantren, madrasah, dan berbagai lembaga pendidikan Islam pada umumnya

tumbuh melalui dukungan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan (Azra, 2019).

Tabel 2. Aktor dalam Multilevel Governance Pendidikan Islam

Aktor	Peran
Pemerintah Pusat	Regulasi dan kebijakan nasional
Pemerintah Daerah	Implementasi dan pengawasan
Kementerian Agama	Pembinaan pendidikan Islam
Organisasi Keagamaan	Penguatan nilai dan partisipasi
Dunia Industri	Dukungan kompetensi dan kemitraan
Masyarakat	Pengawasan dan dukungan sosial

Pengembangan Model Integrative Sustainable Islamic Education Policy Model (ISIEPM)

Berdasarkan hasil sintesis teori dan analisis terhadap berbagai tantangan pendidikan Islam di Indonesia, artikel ini mengembangkan sebuah model konseptual yang disebut *Integrative Sustainable Islamic Education Policy Model* (ISIEPM). Model ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam, pendekatan sistemik, dan tata kelola kolaboratif ke dalam satu kerangka kebijakan pendidikan berkelanjutan. Dimensi pertama model ini adalah *Value Integration*, yaitu integrasi nilai-nilai Islam ke dalam seluruh proses kebijakan pendidikan. Nilai tauhid, amanah, keadilan, dan tawazun menjadi landasan filosofis yang

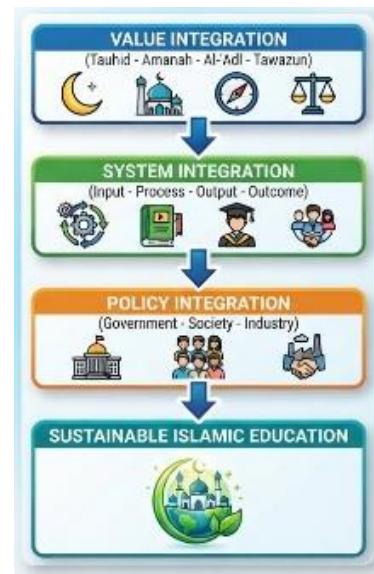
mengarahkan tujuan, proses, dan evaluasi kebijakan pendidikan (Al-Attas, 2018; Nata, 2020). Integrasi nilai diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab sosial yang kuat.

Dimensi kedua adalah *System Integration*, yaitu keterpaduan seluruh komponen pendidikan dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Integrasi sistem mencakup keterhubungan antara input, proses, output, outcome, dan dampak pendidikan (Meadows, 2018). Pendekatan ini memungkinkan terjadinya perbaikan berkelanjutan melalui mekanisme umpan balik yang sistematis. Dimensi ketiga adalah *Policy Integration*, yaitu harmonisasi kebijakan melalui pendekatan *multilevel governance*. Integrasi kebijakan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta (Peters & Pierre, 2016). Kolaborasi tersebut memungkinkan terwujudnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjamin keberlanjutan program pendidikan.

Ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dalam menghasilkan sistem pendidikan Islam yang adaptif, kolaboratif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Model ISIEPM menjadi kontribusi konseptual utama artikel ini karena menawarkan perspektif baru dalam pengembangan kebijakan

pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada integrasi nilai, sistem, dan tata kelola secara simultan.

Berikut peneliti menggambarkan ilustrasi *Integrative Sustainable Islamic Education Policy Model (ISIEPM)* sebagai berikut:



Gambar 1. Integritas Sustainable Islamic Education Policy Model (ISIEPM)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan berkelanjutan membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat parsial, administratif, dan sektoral menuju pendekatan yang integratif, sistemik, dan berorientasi jangka panjang. Pendidikan Islam memiliki fondasi nilai yang kuat untuk mendukung agenda pendidikan berkelanjutan melalui prinsip tauhid, keadilan, amanah, keseimbangan, dan kemaslahatan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan berupa dualisme sistem pendidikan, ketimpangan mutu antar lembaga,

fragmentasi kebijakan, serta belum optimalnya kolaborasi antaraktor dalam tata kelola pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Integrative Sustainable Islamic Education Policy Model (ISIEPM) sebagai kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu value integration, system integration, dan policy integration.

Model ini menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan filosofis kebijakan, pendekatan sistemik sebagai kerangka pengelolaan pendidikan, serta multilevel governance sebagai strategi penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan karakter adaptif, kolaboratif, berbasis nilai, dan berorientasi keberlanjutan, ISIEPM memberikan alternatif paradigma dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada peningkatan mutu kelembagaan, tetapi juga pada pembentukan ekosistem pendidikan yang berkeadilan, responsif terhadap perubahan global, dan mampu menjamin keberlanjutan pendidikan bagi generasi masa depan. Model ini sekaligus memperkaya kajian administrasi pendidikan Islam dengan menghadirkan perspektif integratif yang menghubungkan nilai keislaman, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pendidikan modern dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Kurniawan, D. (2024). Sustainable education policy in Islamic schools: Challenges and opportunities. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 15(2), 120–132.
- Azra, A. (2021). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana.
- Engkoswara, & Komariah, A. (2020). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, N. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, A., & Faizin, M. (2023). Educational governance and policy integration in Islamic education institutions. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 45–59.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Statistik Pendidikan Islam Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Laporan Pendidikan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, A. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- OECD. (2023). *PISA 2022 Results*. Paris: OECD Publishing.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2016). *Governance, Politics and the State*. London: Macmillan.

- Qomar, M. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, M., & Suryadi, A. (2022). Multilevel governance in Indonesian education policy. *Cakrawala Pendidikan*, 41(3), 789–803.
- Rosyada, D. (2020). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana.
- Suharto, T., & Hasanah, U. (2024). Sustainable Islamic education in the digital era. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 1–15.
- Syafaruddin. (2021). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2022). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNESCO. (2020). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. Paris: UNESCO.
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: United Nations.